Halaman

# KPK Bakal Hadirkan Bobby .....

#### Dari Halaman 1

ara, Topan Obaja Ginting (TOP), yang disebut dekat dengan Gubernur Bobby Nasution, akan segera diadili di sana

"Perkara ini sudah limpah ke PN, kita tunggu penetapan jadwal sidangnya, dan kita cermati bersama setiap fakta dalam persidangannya nanti. Sidang terbuka, dapat diakses oleh publik," kata Budi, seperti dilansir Mimbar Umum dari InilahCom, Ahad (16/11/2025).

Meski Bobby tidak dipanggil dalam proses penyidikan, menurut Budi, kemungkinan dirinya akan dipanggil sebagai saksi dalam proses sidang nantinya.

"Dalam pembuktian di persidangan nanti, Tim JPU tentu akan menghadirkan seluruh alat bukti yang di antaranya adalah saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan duduk perkara," ucap Budi

#### ICW Desak Periksa Bobby

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2025).

Aksi yang menampilkan wayang dan penggunaan sejumlah topeng itu merupakan bentuk sindiran terhadap KPK yang dinilai tidak berani memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumut.

"Kita menuntut KPK untuk memeriksa Bobi dalam perkara korupsi pembangunan jalan Sipiongot-Labuhanbatu dan Hutaimbaru-Sipiongot," kata Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah, kepada awak media di lokasi.

Zararah mengingatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, melalui Ketua Majelis Khamozaro Waruwu, pernah memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi dalam sidang terdakwa pemberi suap, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad

Akhirun Piliang.

Menurut Zararah, dasar hukum pemeriksaan Bobby sudah jelas. Namun KPK dinilai terus menunda dan tidak menepati janji yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

"Dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada 30 September juga menyatakan bahwasanya apabila ada perintah dari pengadilan, maka KPK akan memeriksa Bobi Nasution begitu, karena ada dasar hukumnya," ucapnya.

Zararah bahkan menyebut KPK terkesan takut memeriksa menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia merujuk pemberitaan media yang menyatakan adanya usulan internal penyidik untuk memeriksa Bobby, namun tidak ditindaklanjuti kasatgas penyidikan kasus tersebut.

"Bahkan yang kami tahu dari Tempo, penyidik KPK bahkan sudah mengusulkan kepada ketua satgas yang menangani kasus ini untuk memeriksa Bobby, tapi ketiga kepala satgas tersebut tidak ada yang berani untuk memeriksa Bobby," kata Zararah

Dalam aksi tersebut, para peserta duduk di halaman yang dipagari kawat berduri sambil memainkan wayang-wayang kertas berbentuk berbagai tokoh. Mereka juga membawa properti bambu dan sejumlah poster bernada sindiran.

Di belakang peserta aksi terbentang spanduk besar berwarna oranye bertuliskan "KALAU KPK MASIH INDEPENDEN, PERIKSA BOBBY SEKA-RANG!" Puluhan poster senada juga diletakkan di lantai, antara lain bertuliskan "PERIKSA BOBBY," "KPK TAKUT SAMA SIAPA?", hingga "KPK CUPU KARENA CEPU."

Beberapa peserta aksi tampak menggunakan topeng bergambar wajah Jokowi, Bobby, dan Kahiyang Ayu. Aksi teatrikal ini menjadi simbol kritik keras terhadap KPK yang dinilai enggan memeriksa Bobby dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur jalan di Sumut.

Orang Dekat Bobby

Sebelumnya, diberitakan bahwa mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting (TOP), yang disebut dekat dengan Bobby Nasution, akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Medan.

Dua pejabat lain turut menjadi terdakwa, yakni Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Heliyanto (HEL), PPK Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumut.

Ketiganya didakwa terkait penerimaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah melimpahkan berkas perkara dan para terdakwa ke Pengadilan Tipikor Medan.

"Hari ini, Rabu (12/11), Tim JPU KPK melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatra Utara ke PN Tipikor Medan a.n. Tersangka Topan Obaja Ginting, Rasuli, dan Heliyanto," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pemanggilan Bobby masih menunggu laporan jaksa kepada pimpinan KPK

"Kami tambahkan kembali terkait dengan tadi pertanyaan bagaimana saudara BN. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kita juga sama sedang menunggu itu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/11/2025).

Asep menjelaskan laporan jaksa baru akan disampaikan setelah sidang perkara dengan terdakwa pemberi suap, Muhammad Akhirun Piliang (KIR), diputuskan. Pemanggilan Bobby kemungkinan dilakukan pada sidang lain yang masih berkaitan dengan perkara yang menjerat Topan Obaja Ginting.

"Ini kan belum putusannya. Putusannya seperti apa, setelah persidangan baru dilaporkan. Kita tunggu ya, sama-sama," ujar Asep.(ic/js)

# Purbaya Dorong Media Lantang Kritik Pemerintah .....

#### Dari Halaman 1

intah sebelumnya, sehingga perekonomian lesu dan berdampak pada kantor berita.

"Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh, katanya bisnis journalism, media lagi turun. Saya bilang ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, anda diam aja," ujar Purbaya dalam acara 'Run for Good Journalism', dikutip dari Antara, Minggu (16/11).

Ia bahkan menyebut perekonomian yang anjlok beberapa waktu ikut disebabkan oleh media massa yang tidak vokal. Oleh sebab itu, ke depannya ia meminta media lantang bersuara.

"Kedepan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi, ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa," imbuhnya.

Kendati, dalam kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, ia memperkirakan ekonomi akan tumbuh melesat. Di kuartal IV diproyeksi bisa tumbuh di atas 5,5 persen.

"Saya sih kira-kira di triwulan ke IV, ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen, mungkin 5,6 persen, 5,7 persen. Yang penting, tadinya akan turun ke bawah, kita sudah mulai balik ke sana, ke arah yang lebih cepat lagi," jelasnya.

Indeks Kemerdekaan Pers

Berdasarkan data Dewan Pers, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia kembali mengalami penurunan pada 2024 dengan skor 69,36. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 2 poin dari tahun sebelumnya sebesar 71,57.

Skor IKP Indonesia 2024 ini juga tercatat sebagai yang terendah sejak 2019 lalu yang sempat terpuruk pada skor 73,01.

Angka yang diraih kali ini juga menunjukkan tren kebebasan pers nasional yang terus mengalami penurunan dalam dua tahun ke belakang. Hal ini bisa dilihat dari raihan skor IKP selama dua tahun ke belakang.

Pada tahun 2022, skor IKP Indonesia berada pada 77,78. Angka ini turun 6 poin ke 71,57 pada 2023. Penurunan pun terus berlanjut hingga tahun ini.

Sementara, dari data Reporters Without Borders, posisi kebebasan pers Indonesia berada pada peringkat 127 dari 180 negara di 2025. Skor ini adalah 44,13 (dari skala 0-100), yang digolongkan sebagai 'situasi sulit' untuk kebebasan pers.(ant/js)

# Kejati Sumut Didesak Tetapkan Tersangka ......

#### Dari Halaman 1

Dalam LHP BPK Auditoriat Utama Keuangan Negara VII Tahun 2025, Nomor 19/LHP/XX/I/2025, tertulis bahwa kebijakan penjualan aluminium alloy kepada PT PASU menggunakan metode pembayaran tanpa agunan kurang prudent.

Bahkan metode pembayaran berbasis Document Against Acceptance (D/A) itu hanya diberikan kepada PT PASU, yang menurut BPK memiliki risiko tinggi gagal bayar.

Fakta lain yang disorot BPK, yakni keberadaan piutang PT PASU kepada PT Inalum yang terus menggantung. Neraca PT Inalum per 31 Desember 2021–2022 mencatat piutang sebesar USD 1,79 ribu.

Namun daftar outstanding piutang yang belum dibayar PT PASU hingga 30 Desember 2023, justru membengkak menjadi USD 8.190.333,24 dari 29 invoice sejak 2020–2021. BPK juga menyoroti kelalaian manajerial di tubuh PT Inalum. Di antaranya permintaan persetujuan (RVA) metode D/A pada 2020 tidak sesuai pedoman SK-020/DIR/2019. Kemudian, risiko gagal bayar tidak dikaji dan tetap dijalankan.

Tidak ada evaluasi perjanjian, meski laporan keuangan PT PASU menunjukkan situasi keuangan bermasalah.

Kegagalan bayar PT PASU tidak diproses secara hukum meski kontrak mengamanatkan hal tersebut. Tidak ada kesepakatan tertulis untuk penyelesaian piutang macet.

Ratama menilai rangkaian temuan itu mengarah pada dugaan kuat adanya pemufakatan jahat antara pihak PT Inalum dan PT PASU.

"Kebijakan berubah, agunan dihapus, risiko diabaikan, kegagalan bayar tidak ditindak. Ini pola yang tidak bisa dianggap keliru secara administrasi semata," ujarnya.

DIREKSI MELANGĞAR KEBIJAKAN INTERNAL

Dalam pernyataannya, Ratama bahkan

menuding bahwa direksi PT Inalum pada 2019 serta sejumlah pejabat tinggi perusahaan—termasuk SEVP Pengembangan Usaha dan SEVP Keuangan Operasional—diduga sengaja mengabaikan kewajiban melindungi kepentingan perusahaan.

Deputy GM Marketing & Sales juga disebut BPK lalai melakukan evaluasi kontrak berdasarkan kondisi keuangan PT PASU.

"Ini bukan perkara administratif lagi. Jika temuan BPK dibaca utuh, terlihat jelas ada tindakan pembiaran yang sistematis," tegas Ratama.

Untuk itu, Ratama meminta Kepala Kejatisu Harli Siregar bergerak cepat. Menurutnya, temuan BPK sudah lebih dari cukup untuk menaikkan status sejumlah pihak dari saksi menjadi tersangka.

"Publik menunggu ketegasan hukum. Jangan sampai Kejatisu dianggap sengaja memperlambat. Semua sudah terang-benderang dalam LHP BPK," tutupnya.(boc/js)

•••••

### WHO: 900 Pasien di Gaza Meninggal Akibat

#### Dari Halaman 1

anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan medis untuk menyelamatkan nyawa. Organisasi tersebut memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut dalam menangani kasus-kasus kritis sama dengan hukuman mati

Sejak Mei 2024, organisasi tersebut telah melaksanakan 119 misi evakuasi, berhasil memindahkan 8.000 pasien untuk perawatan di luar Gaza, termasuk 5.500 anak-anak. Namun, ribuan pasien masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan, menghadapi masa depan yang tidak pasti di tengah runtuhnya sistem layanan kesehatan.

Kepala WHO mengatakan, lembaganya sedang bekerja di Gaza untuk membangun kembali layanan kesehatan yang hancur dan memindahkan pasien yang terluka parah keluar dari wilayah tersebut satu bulan setelah gencatan senjata disepakati.

Dalam postingan di X, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengucapkan terima kasih kepada 30 negara yang sejauh ini telah menerima pasien dan menyerukan negara lain untuk bergabung, dengan mengatakan "lebih dari 16.500 pasien, termasuk hampir 4.000 anak-anak, sedang menunggu evakuasi untuk menerima perawatan darurat di luar Gaza." Tedros juga menyerukan agar semua jalur evakuasi dibuka, "khususnya ke Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur".

Sebuah laporan dari Institut Asuransi Nasional Israel mengungkapkan bahwa 58 persen keluarga Palestina di Israel mengalami kerawanan pangan, dan hanya 10 persen dari rumah tangga tersebut yang menikmati tingkat ketahanan pangan yang tinggi.

Laporan yang dirilis hari ini dan mencakup tahun 2024, menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam ketahanan pangan antar populasi. Keluarga Palestina

di Israel, khususnya mereka yang memiliki satu atau dua anak, memiliki kemungkinan 3,5 kali lebih besar menghadapi kerawanan pangan dibandingkan dengan keluarga Yahudi non-Haredi. Di antara komunitas Yahudi Haredi, kerawanan pangan mempengaruhi 25 persen rumah tangga.

Lebih dari seperempat rumah tangga di Israel, setara dengan 2,8 juta orang (termasuk lebih dari satu juta anak-anak), melaporkan tidak mampu menyediakan makanan dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Jumlah ini setara dengan 27,1 persen dari seluruh rumah tangga Israel, meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan 30,8 persen pada 2023.

Survei tersebut, yang dilakukan antara bulan Mei dan November 2024, melibatkan sampel 5.000 orang dewasa dan didasarkan pada versi singkat survei ketahanan pangan Departemen Pertanian AS, yang mencakup enam pertanyaan tentang kuantitas, kualitas, dan ketersediaan pangan di rumah tangga. (rep/js)

# Bank Sumut Beroperasi dalam Kegelapan Hukum .....

#### Dari Halaman 1

rubahan status Bank Sumut menjadi Perseroda. Namun fraksi banteng itu mengingatkan bahwa revisi status tidak boleh dipakai sebagai cuci tangan institusional.

"Perubahan status bukan obat penghapus dosa. Penyesuaian hukum harus dilakukan, tapi tanggung jawab atas kekacauan lima tahun ini juga harus dituntaskan. Tidak boleh ada bab yang ditutup begitu saja," kata Syahrul menutup pandangannya.

## LIPPSU Dukung Ranperda Penyertaan Modal

Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, mendukung rencana Pemprovsu yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut).

Ari Sinik -- panggilan Azhari AM Sinik, merespon Ranperda penyertaan modal dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (14/11/2025).

"Penyertaan modal ini akan mendukung rencana PT Bank Sumut yang tengah melaksanakan agenda transformasi menuju KBMI 2, dengan target modal inti di atas Rp6 triliun sebagaimana tertuang dalam Corporate Planning periode 2024–2028," jelas Ari.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 411
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang memungkinkan penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja

Dengan penambahan modal nantinya, hal itu akan memperkuat kinerja, ekspansi dan kemamp-

uan fiskal Bank Sumut serta memperkuat kinerja dan struktur permodalan Bank Sumut sebagai salah satu BUMD strategis di daerah.

Peningkatan status Bank Sumut menjadi KBMI 2 (modal inti Rp6 triliun sampai kurang dari Rp14 triliun) akan membawa dampak signifikan.

Antara lain, peningkatan ruang ekspansi, yakni bank memiliki ruang lebih besar untuk mengelola dana, memperluas pembiayaan, dan mengambil peran strategis, seperti pengelolaan dana haji.

"Modal yang lebih besar menunjukkan ketahanan dan stabilitas bank, yang akan memperkuat kepercayaan publik," ujar Ari.

Begitu juga dalam kontribusi PAD, di mana kinerja bank diharapkan memberikan dampak langsung bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara.

Dengan demikian, Bank Sumut memiliki daya saing, sehinga akan menjadi bank daerah yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing nasional. (A-10)

# Alumni Tolak Digelar .....

#### Dari Halaman 1

Baru kali ini, kata dia, pemilihan rektor digelar di luar kantor Kementerian Pendidikan.

"Kami menduga adanya tekanan kepada Menteri Brian agar mengikuti kehendak Menteri Imipas yang juga Ketua MWA. Kemandirian kampus hilang hanya untuk kepentingan politis," kata Taufik Umar Dani, dilansir dari Tempo, Ahad (16/11).

Pada Pasal 25 Statuta USU, kata Taufik, pemilihan rektor ditegaskan harus berlangsung demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Rapat tertutup tanpa pemberitahuan kepada civitas akademika melemahkan prinsip ini. Bahkan, keputusan berkumpul di luar kampus, terlebih di gedung pemerintahan yang tidak terkait dengan pendidikan tinggi, memperkuat dugaan bahwa MWA ingin menghindari pengawasan publik.

Proses pemilihan Rektor USU menjadi sorotan setelah salah satu calon rektor melayangkan keberatan resmi kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Calon yang tak ingin disebutkan namanya itu menilai MWA berupaya mengebut penetapan rektor baru tanpa menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur dalam pemilihan yang digelar pada 25 September 2025.

Dalam surat tertanggal 12 November 2025 itu, calon rektor tersebut menyebutkan proses sebelumnya sudah ia laporkan ke kementerian karena diduga tidak mengikuti tata cara pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.

Dia turut menceritakan bahwa Inspektorat Jenderal telah turun melakukan pemeriksaan fisik ke kampus pada 13–18 Oktober dan memeriksa sejumlah pejabat. Namun hingga kini, hasil audit belum pernah disampaikan kepada para pihak.

"Status laporan investigasi masih dalam proses penyusunan," ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 14 November 2025.

Calon rektor itu menilai rencana MWA menggelar rapat pleno penetapan rektor pada 18 November 2025 terlalu tergesa dan bertentangan dengan asas kehati-hatian penyelenggara pendidikan tinggi. Ia juga menyoroti keputusan MWA memilih gedung Kementerian Imipas sebagai lokasi rapat tanpa koordinasi dengan kementerian pembina yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang menurut dia, dapat menimbulkan kesan ketidaktertiban administrasi.

Selain pelanggaran tata kelola, dia turut menyinggung beredarnya informasi mengenai salah satu calon rektor yang disebut tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta kementerian memastikan status seluruh calon untuk menjaga integritas proses pemilihan.

Salah satu calon rektor USU itu mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menunda rapat pleno, menuntaskan audit Inspektorat, dan mengeluarkan arahan resmi agar pemilihan rektor USU berlangsung sesuai ketentuan statuta. Baginya, percepatan penetapan tanpa menyelesaikan temuan prosedural berpotensi merusak kredibilitas institusi dan mencederai kepercayaan publik. (tem/js)

# Hidayah

# Kasus Bobby Ujian KPK

wayang, topeng, dan poster bertuliskan "Periksa Bobby Sekarang!", menjadi simbol kritik keras publik terhadap lembaga antirasuah. Sindiran ini tidak muncul dari ruang hampa: ICW merujuk pada fakta bahwa internal penyidik KPK pernah mengusulkan pemanggilan Bobby, namun tidak ditindaklanjuti. Dugaan adanya ketakutan politik atau perlakuan istimewa terhadap figur yang dekat dengan Presiden memperkuat persepsi publik bahwa hukum bisa bersifat selektif.

KPK, melalui juru bicaranya, menyatakan proses hukum masih berjalan, dengan berkas terdakwa utama telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan. Bobby Nasution disebut kemungkinan akan dipanggil sebagai saksi di sidang yang masih berkaitan dengan perkara tersebut. Secara formal, KPK menegaskan proses ini sah dan sidang terbuka dapat diakses publik. Namun, bagi masyarakat awam, pernyataan ini belum cukup. Publik menuntut kepastian, bukan sekadar janji prosedural. Lambatnya pemanggilan dan penjelasan yang berputar-putar justru menimbulkan kesan mengulur waktu.

Kasus ini mengingatkan kita bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya dijalankan berdasarkan prosedur internal

Hukum yang berjalan lambat atau tampak menghindari figur tertentu akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi antikorupsi. Di era digital, persepsi publik terbentuk cepat melalui media sosial. Ketika lembaga hukum dianggap memilih-milih, kekecewaan masyarakat bisa meledak dan merusak kredibilitas institusi yang seharusnya menjadi simbol keadilan.

ICW dan aktivis masyarakat sipil memiliki peran penting di sini. Mereka menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui kebenaran, bukan sekadar menerima narasi resmi yang bersifat ambigu. Aksi teatrikal mereka, meski provokatif, sebenarnya merupakan bentuk pengawasan sosial yang sah: mendorong KPK agar bekerja lebih transparan dan tidak tunduk pada tekanan politik. Ini adalah fungsi demokrasi yang sehat.

Namun, KPK juga tidak bisa dipaksa mengambil langkah yang bisa dianggap melanggar prosedur hukum atau menyalahi etika penyidikan. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan harapan publik. Lembaga antikorupsi harus menunjukkan bahwa proses hukum tetap kredibel, independen, dan adil, tanpa memperlihatkan kesan "takut" atau "memilih-milih".

Rakyat berhak kecewa, dan kekecewaan ini sah. Tetapi kekecewaan itu juga bisa menjadi dorongan konstruktif: pengingat bagi KPK bahwa independensi lembaga bukan hanya soal prosedur internal, tapi juga soal bagaimana publik menilai kredibilitas dan keberanian lembaga itu. Jika KPK mampu menegakkan hukum secara transparan, memanggil saksi penting tanpa pandang bulu, dan membuka proses persidangan untuk publik, maka independensi mereka akan teruji dan terkonfirmasi.

Kasus Bobby Nasution adalah ujian nyata. Bukan hanya bagi KPK, tapi bagi seluruh sistem hukum Indonesia. Transparansi, keberanian, dan konsistensi dalam menegakkan hukum adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Rakyat menuntut jawaban tegas, bukan janji yang berputar-putar. Dan di sinilah kredibilitas KPK akan benar-benar diuji: apakah lembaga antikorupsi mampu menegakkan hukum tanpa kompromi, ataukah independensinya hanya terlihat di atas kertas?